

FORUM GROUP DISCUSSION



BUKU

**PANCASILA:
DINAMIKA DAN MASA DEPAN BANGSA**

DISELENGGARAKAN OLEH
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGIS PANCASILA
(BPIP)

Di Jimbaran, 7 - 9 Nopember 2019

BEBERAPA CATATAN TENTANG BUKU

PANCASILA: DINAMIKA DAN MASA DEPAN BANGSA

Buku "Pancasila: Dialektika dan Masa Depan Bangsa" merupakan buku penting - seperti sudah terungkap dalam judulnya. Buku ini ditulis karena kalau Pancasila terancam, masa depan bangsa terancam. Buku ini kaya informasi dan refleksinya dan merupakan teks yang enak dibaca. Namun di sini tentu akan diajukan hal-hal yang - menurut saya - masih merupakan harapan.

DUA TANTANGAN

Yang tidak saya temukan adalah fokus pada dua tantangan terhadap Pancasila yang sekarang dihadapi Pancasila. Keduanya terutama menyangkut generasi muda, khususnya para mahasiswa dan pemuda-pemudi di SMA.

Tantangan pertama adalah rasa tidak peduli/bosan terhadap Pancasila. Bagi banyak generasi NOW Pancasila adalah omongan generasi tua. Mereka mau menjadi profes-

sional dunia industri 4. Bagi mereka Pancasila tidak lagi bersinar.

Tantangan kedua adalah eksklusivisme dan ekstremisme agamis yang menganggap negara Pancasila sebagai produk korup pikiran manusia yang perlu diganti dengan kenegaraan yang berdasarkan hukum Tuhan.

Dua tantangan itu tidak diatasi dengan macam-macam renungan tentang keindahan Pancasila melainkan dengan menunjukkan apa yang menjadi fungsi hakiki Pancasila. Baru dengan bertolak fungsi hakiki Pancasila kita mendapat untuk meyakinkan orang muda kita tentang Pancasila.

FUNGSI PANCASILA

Untuk itu kita harus kembali ke sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 terjadi sesuatu yang luar biasa: ratusan pemuda dari seluruh wilayah Indonesia bersumpah akan memperjuangkan satu tanah Indonesia, satu bangsa Indonesia, dengan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Lahirlah bangsa Indonesia yang mencakup komunitas-komunitas "dari Sabang sampai Merauke".

Akan tetapi, komunitas-komunitas dengan ratusan identitas etnik dan budaya serta dengan suatu pluralitas identitas agama hanya dapat bersatu menjadi bangsa yang betul-betul merasa bersatu kalau satu syarat terpenuhi: Bahwa semua komunitas bersedia saling mengakui dan menghormati

dalam identitas masing-masing. Itulah yang terwujud dalam Pancasila.

Masalah itu muncul dengan tajam dalam BPUPKI, mengingat bahwa 87% bangsa Indonesia beragama Islam: Apakah Indonesia akan menjadi negara agama, ya negara Islam, atau negara nasionalis(-sekuler)? Menjawablah Soekarno: Tidak perlu dipilih apa mau menjadi negara Islam atau negara nasionalis(-sekuler), karena dasar Indonesia adalah Pancasila.

Panitia 9 kemudian, dengan maksud mengakomodasi mayoritas Islam yang begitu besar memberi rumusan kepada Pancasila yang kita sebut Piagam Jakarta. Tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945 Hatta meyakinkan pada wakil Islam agar menyetujui pencabutan "tujuh kata" dari Piagam Jakarta (Ketuhanan "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya"), karena kalau dalam teks paling dasar negara satu agama disebut secara khusus, komunitas agama-agama lain tak pernah akan memandang negara itu sebagai agama mereka sendiri.

Dengan menyetujui Pancasila dalam bentuk akhir itu (seperti ditulis pada akhir Pembukaan UUD 1945) para wakil Islam memungkinkan sesuatu yang luar biasa: Bahwa Indonesia memberikan diri sebuah konstitusi di mana agama mayoritas tidak menuntut diberi kedudukan khusus. Dengan demikian Indonesia menjadi milik semua komunitas, entah mayoritas, entah minoritas, di mana identitas nasional tidak menekan atau menindas, melainkan melindungi dan

meluhurkan identitas masing-masing komunitas. Karena itu orang Jawa bisa menjadi Indonesia tanpa harus mengurangi ke-Jawannya, orang Bugis Indonesia tetap Bugis penuh, orang Katolik tetap Katolik setia, dan keislaman komunitas Muslim tetap utuh. Pancasila adalah mukjizat yang memungkinkan bahwa dalam negara Indonesia semua komunitas dapat hidup sepenuhnya menurut aspirasi mereka, tak ada yang perlu mengurbankan sesuatu dari identitasnya sendiri dengan menjadi Indonesia.

Dengan demikian juga jelas: inti tuntutan Pancasila adalah kesediaan semua komunitas Indonesia untuk saling mengakui, saling menghormati, jadi kesediaan untuk hidup dan bekerja sama dengan mereka yang berbeda. Dan satu-satunya dosa dasar terhadap Pancasila adalah kalau satu komunitas, atau kelompok komunitas, menuntut hak dan kedudukan eksklusif di Indonesia.

Itulah yang harus diajukan kepada mereka yang mengambil jarak terhadap Pancasila. Bahwa di tengah-tengah dunia yang kacau suatu Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan lingkungan hidup, berkembang dan beraspirasi mereka yang paling bagus, yang pantas dibanggakan, dan perlu dibela dan terus dimajukan. Dan bahwa di negara Pancasila identitas keagamaan justru dapat diungkap murni karena di satu pihak Pancasila memberi ruang agar masing-masing komunitas agamis bisa hidup sesuai aspirasi mereka, tetapi di lain pihak mereka tidak perlu saling membenci, sa-

ling mencurigai, saling memusuhi, jadi dapat saling menghormati justru atas jaminan keutuhan keagamaan mereka, sesuai dengan ajaran agama-agama yang memang menuntut sikap positif dan toleran terhadap mereka yang berbeda.

Itulah yang seharusnya menjadi fokus buku ini.

MASING-MASING SILA

Lima sila Pancasila merupakan nilai-nilai, cita-cita dan tolok ukur etika perpolitikan Indonesia. D. l. k.: Pancasila harus mempunyai gigi. Yang diperlukan bukan keindahan pelbagai inspirasi, melainkan kriteria tajam untuk mengukur apakah suatu tindakan politik dapat dibenarkan atau tidak, dilihat dari lima sila Pancasila.

Menurut penulis ini para penulis tidak cukup memperhatikan bahwa Pancasila bukan hanya berakar dalam budaya, paham-paham dan etika bangsa Indonesia sejak ratusan tahun. Melainkan Pancasila juga dimaksud menjadi etika suatu negara yang semodern-modernnya, yang tak kalah dengan negara lain sama sekali. Rupanya tidak diperhatikan sesuatu yang baru menunjukkan kejenialan Bung Karno: Bahwa empat sila, sila pertama, kedua, keempat dan kelima memuat prinsip-prinsip etika kemanusiaan pasca-tradisional paling dasar padanya mutu etis dan kemanusiaan suatu sistem politik diukur: kebebasan agama, hak-hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sosial. Sedangkan sila tengah (sila ke-3) mengungkapkan prinsip kenegaraan modern fun-

damental bahwa negara modern adalah negara bangsa yang mempunyai kedudukan dalam hati bangsanya.

Berikut ini beberapa catatan tentang uraian hal sila pertama, kedua dan keempat. Yang ketiga dan kelima tidak sempat saya baca, saya harap, tak bisa keliru di situ.

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Yang saya baca dalam buku ini adalah suatu pelancongan mengesankan melalui filsafat, teologi, teosofi, antroposi, *philosophia perennis* dll. selama lebih dari dua ribu tahun: Luar biasa (catatan: kok pemikiran Jawa tidak disinggung? Apa karena Panitia takut dituduh tersangkut "Pancasila HaNaCaRaKa" Soeharto?)! Kesan saya, yang mau diperlihatkan adalah betapa hebat Pancasila, bahwa Pancasila tak kalah dengan pemikiran serupa lain di dunia. Iya boleh-boleh saja.

LIMA CATATAN

Pertama: Apakah pelancongan intelektual-spiritualis itu akan membuat mereka yang menolak Pancasila menjadi pendukungnya, apalagi pejuangnya? Menurut saya apa yang dapat disebut *the religious mind* tidak menempatkan agamanya sebagai salah satu tradisi spiritual umat manusia, melainkan meyakinkannya sebagai kebenaran. Dari *mind* ini ia mendekati pertanyaan apakah negara harus diatur atas dasar sesuatu seperti Pancasila atau atas dasar agamanya.

Kedua: Bisa saja kekayaan spiritual yang dilancong! menutup bahwa sebenarnya ada dua hal yang betul-betul inti sebagai implikasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa: Dari pihak negara kewajiban untuk menjamin **kebebasan beragama** (disebut satu kali dalam buku tebal ini), dan dari pihak masyarakat **kesediaan untuk bertoleransi**.¹

Ketiga: Buku dengan tepat mengutip Daniel Dhakidae yang mempertanyakan hal "enam agama yang diakui". Namun kemudian tak diangkat lagi. Pancasila tak kenal "agama yang diakui", bahkan tidak bicara agama, melainkan Ketuhanan. Dalam pembukaan UUD kita ditulis "bahwa negara... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Lha kok negara berani membatasi perlindungan pada warga enam agama saja? Kok masjid orang Achmadiyah bisa dibakar, orang-orang Syia bisa diusir dari kampung halaman mereka, dan kampung damai 1500 orang eks-Gafatar dibakar – dan negara tidak berbuat apa-apa. Negara macam ini bicara Pancasila?

Keempat: Menurut saya, daripada uraian panjang dari Plotin sampai Huxley (bukan theis dia) mengapa tidak diperhatikan perkembangan amat positif hubungan antar umat beragama di Indonesia dalam 30 tahun terakhir? Per-

1 Ditulis bahwa "bukan agama yang ditoleransi, melainkan sikap sosial warga antar umat beragama harus dibangun berbasis toleransi"; itu menurut saya tidak benar, tentu agama sendiri harus ditoleransi.

kembangan ini menunjukkan bagaimana *the religious mind* bekerja. Islam dan Kristianitas dari kesadaran mereka sendiri semakin saling menerima dan bersahabat dan itulah yang seharusnya diberi dukungan dalam uraian tentang sila pertama. Seperti yang terjadi terjadi tidak hanya di Indonesia.²

Kelima: Dalam sila pertama pun ucapan Bung Karno yang begitu bagus harusnya sudah dijadikan unsur penting dalam mewujudkannya, yaitu ucapan tentang "Ketuhanan yang berkebudayaan, yang berbudi pekerti luhur,... yang saling menghormati satu sama lain". Itu saja sebenarnya sudah cukup. Hanya kalau keagamaan menunjukkan diri sebagai berbudaya, beradab, dan penuh hormat terhadap mereka yang berbeda keagamaan itu merupakan suatu nilai dan bukan malapetaka.

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

Dalam uraian sila kedua ini pun saya mencari fokus. Menurut saya dalam sila ke-2 - yang oleh Prof. N. Drijarkara dianggap sila pusat dan kunci – seharusnya ada dua unsur yang tak dapat ditawar-tawar: bahwa perpolitikan kita -dan tentu

² Misalnya kunjungan Paus Benedikt XVI 2006 ke Masjid Biru di Istanbul, lalu surat *A Common Word* 2007 oleh 138 tokoh Muslim; *"Agenda for Humanity"* 2016 oleh World Humanitarian Summit, akhirnya pertemuan Paus Fransiskus dengan Imam Besar Universitas al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, Abudabi, 2019 ; lih. Sudibyo Markus, *Dunia Barat dan Islam*, Jkt 2019

juga hidup bersama kita- mesti berperikemanusiaan yang adil dan berperikemanusiaan yang berabad. Itulah yang perlu menjadi fokus.

Perikemanusiaan yang berabad berarti: Secara prinsip kita memecahkan segenap konflik tanpa kekerasan. Itu sangat penting, sangat relevan, dan tidak mencolok. Kita harus mendidik masyarakat bahwa saling pukul dan saling kero-yok bukan kelakuan orang yang beradab. Harusnya juga dinyatakan dengan jelas bahwa sila kedua ini berarti bahwa kita tidak pernah boleh mengizinkan pembunuhan-pembunuhan seperti beberapa kali terjadi dalam sejarah bangsa, terulang. Di sini juga termasuk bahwa kita menolak segenap ungkapan rasisme.

Perikemanusiaan yang adil tak bisa lain daripada pene-gasan tanpa ragu-ragu pada jaminan minimum keadilan, yaitu jaminan tanpa tawar-tawar hak-hak asasi manusia. Syukur, hak-hak asasi manusia memang dibahas, dan dengan tepat sebagai pengejaan hormat terhadap martabat manusia. Meski hanya dalam satu alinea saja, padahal hak-hak asasi manusia merupakan inti kokoh etika kemanusiaan pasca-tradisional dan tolok ukur keberadaban kehidupan suatu bangsa.

Namun sayang, dalam bagian "Pembangunan Nasional" klise-klise lama-feodalistik tentang hak-hak asasi manusia muncul kembali. Siapa yang sekarang masih mengacu pada

daftar (bagus) hak-hak asasi manusia Revolusi Prancis? Tentu acuan hak-hak asasi manusia sekarang adalah *Declaration on Human Rights* PBB 1948 yang amat bagus, dan Konvensi-konvensi PBB 1966. Muncul lagi lagu lama tentang bahaya individualisme. Betul, individualisme - sikap hanya memperhatikan/meminati kepentingannya sendiri - tidak dapat membangun suatu masyarakat. Tetapi kok diangkat dalam kaitan dengan hak-hak asasi manusia? Hak-hak asasi manusia bukan tanda individualisme melainkan kebalikan. Hormat terhadap hak-hak asasi manusia adalah bukti solidaritas masyarakat dengan para warga yang lemah, miskin, tak bisa bela diri. Mereka yang kuat tidak memerlukan hak-hak asasi manusia, mereka bisa membela diri sendiri. Tetapi dengan menjamin hak-hak asasi manusia orang kecil ia diberi pesan bahwa "meski Kau tak bisa mengancam kami, kau saudara kami dan kami tidak meninggalkan engkau."³

³ Salah satu omongan paling – maaf – idiot adalah omongan tentang ciri kolektif masyarakat Indonesia. Kolektivisme adalah sikap orang yang tak punya kepribadian, maka ikut ramai-ramai mengeroyok maling atau membakar perumahan Gafatar. Kolektivisme adalah produk pembusukan kepribadian. Masyarakat Indonesia secara tradisional bukan kolektivistik, melainkan komunal. Itu amat berbeda. Lagi pula omongan, misalnya tentang gotong-royong, mengabaikan bahwa sudah sejak sebelum kemerdekaan masyarakat Indonesia semakin di-individualkan dalam arti, bahwa ia tidak lagi bisa hidup dari gotong-royong dan komunitas (Prof. Koentjaraningrat di tahun 60-an sudah menulis bahwa kebiasaan-kebiasaan gotong-royong sudah tidak berfungsi, kecuali dalam hal kesripahan. Empat contoh individualisasi itu: (1) Hampir tidak lagi ada orang/keuarga yang bisa hidup dari komunitasnya, semua harus mempunyai tempat kerja individual dengan pembayaran individual (dari para hadirin seminar ini tak ada satu pun yang bisa hidup dari kekeluargaan/GR kampungnya). (2) Tanpa

Lagi-lagi, di Bagian V, Bidang Hukum, huruf F ditulis bahwa "dalam demokrasi Pancasila hak asasi menyeimbangkan hak individu dengan hak masyarakat dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik temu". Maaf, itu tak lain suatu sabotase terhadap apa yang mau dicapai umat manusia dengan hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia justru tidak dapat ditawar-tawar dan justru tidak dapat dimusyawarahkan (tak dapat dimusyawarahkan apakah orang tertentu diperlakukan sebagai manusia atau tidak). Karena nilai manusia, betapa pun dia "tidak berarti" atau "kurang penting" daripada suatu "kepentingan bersama", tidak dapat ditawar-tawar. Dalam ini UUD kita yang berlaku sekarang lebih tepat. Di situ dirumuskan bahwa dalam situasi kritis hak-hak asasi manusia memang boleh dibatasi, tetapi tidak semua; ada yang mutlak tak tersentuh (§ 28 I nr. 1). Hak-hak asasi manusia justru mutlak, dan orang kecil, orang miskin, orang yang menghuni pemukiman kumuh, orang yang mengganggu eksploitasi hutan tidak boleh kepentingannya "diseimbangkan" dengan kepentingan suatu kolektif.

uang di saku Anda tidak ada, alias mati. (3) Tanpa surat individual, KTP dsb. Anda juga tidak ada, Anda bisa mati. (4) Sejak SD anak-anak kita dididik dengan sistem ranking individual, dan kalau waktu ujian ada yang membantu teman dalam menemukan jawaban, ia malah dihukum.

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN

Dalam uraian tentang sila keempat saya tidak menemukan kesalahan. Tetapi seharusnya ditulis bahwa sila yang panjang itu tak lain adalah penegasan bahwa Indonesia harus demokratis, demokratis tanpa embel-embel (panjangnya sila ke-empat mencerminkan perbedaan pendapat tentang demokrasi pada Juli 1945 - yang kemudian menjadi efektif dalam naik - turun demokrasi Indonesia sampai akhirnya dimantapkan dalam undang-undang dasar kita sesudah para mahasiswa kita berhasil menjatuhkan resim Orde Baru). Tantangan terhadap demokrasi hasil peruntuhan Orde Baru sepertinya tak terangkat. Justru itulah yang menantang orang muda sekarang.⁴ Tetapi dapat dipuji bahwa para penulis tidak memasukkan omongan warisan Orde Baru bahwa sistem *one man one vote* tidak sesuai dengan demokrasi menurut sila ke-empat (omongan yang bersumber dari kecurigaan neo-feodalis terhadap "rakyat").

BEBERAPA CATATAN KECIL

Halaman 214:PS tentu lebih daripada "bintang penuntun (Leitstern)" pembangunan nasional: dia norma etisnya, arti-

4 Misalnya perbedaan antara posisi Sukarno dan Hatta tak terangkat. Sukarno yang melihat demokrasi desa sebagai model demokrasi Indonesia. Hatta yang mengatakan bahwa demokrasi desa membantu agar masyarakat bersemangat demokratis, tetapi tidak cocok sebagai model bentuk suatu negara modern demokratis.

nya pada Pancasila harus dicek apakah suatu tindakan pemerintahan maupun legislatif dapat dibenarkan atau tidak.

Halaman 219: Muncul lagi klise dari alm. Penataran P4 bahwa kita harus "menolak pengaruh buruk kebudayaan asing". Yang bisa ditolak adalah kelakuan/pandangan/mode-mode/norma-norma tertentu, bukan pengaruh budaya. Kita tak perlu menolak budaya, tetapi diharapkan mempunyai kepribadian sendiri yang membuat kita tidak larut dalam "budaya asing" melainkan diperkaya olehnya. Kalau ada kelakuan/pandangan/mode-mode/norma-norma tertentu yang dirasa perlu ditolak, misalnya karena dianggap tidak etis, maka itu harus terjadi dalam suatu diskursus terbuka (misalnya sangat menyedihkan bahwa masalah sekitar LGBT tidak dapat dibicarakan, bahkan di lingkungan perguruan tinggi).

Halaman 219 s.: Hal pendidikan agama: kok lemah sekali. Harusnya fokus diberikan pada kewajiban untuk saling menghormati dan bertoleransi serta nilai dan keindahan sikap terbuka itu. Hal pembinaan dan pembangunan rumah-rumah ibadat (h. 220) menghindar dari masalahnya.■

Jakarta, 6 November 2019
Franz Magnis-Suseno